

Gelar UNBK, Sekolah Siapkan Server Cadangan

SEKUPANG – Hari pertama pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMKN 4 Batam, Tiban berjalan lancar tanpa kendala, Senin (2/4). Tahun ini, ada sebanyak 305 siswa mengikuti ujian berbasis komputer. Pelaksanaan UNBK dilak-

sanakan serentak di seluruh Indonesia, dan di hari pertama kemarin siswa dihadapi ujian mata pelajaran Bahasa Indonesia.

Pantauan *KORAN SINDO BATAM* di SMKN 4 Batam ujian digelar tiga sesi. Sesi pertama dimulai pukul 07.30-09.30, sesi

kedua pukul 10.30-12.30, dan sesi ketiga pukul 14.00-16.00.

Pihak sekolah menyediakan 102 unit komputer untuk menggelar UNBK. Sedangkan server yang digunakan ada enam, dengan tiga server utama. "Selain itu, ada 13 server cadangan yang

dipersiapkan jika terjadi kerusakan," kata Kepala SMKN 4 Batam, Ahmad Tahir.

Dia menjelaskan, ada 40 soal dalam ujian Bahasa Indonesia dan setiap sesi siswa wajib menyelesaikannya dalam 2 jam. Sedangkan ruangan yang dipakai

untuk UNBK ada 5 kelas, dan setiap ruangan berisi 23-24 peserta ujian dengan dijaga tiga pengawas. Satu pengawas Proktor, satu pengawas sekolah, dan satu pengawas dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri.

Ke hal 12))

Gelar UNBK...

((Dari hal 9

"SMKN 4 Batam ada empat jurusan, yakni jurusan Kimia Analisis, Multimedia, Kimia Industri, dan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)," ujarnya. Tahir menambahkan, ujian berbasis komputer di SMKN 4 Batam sudah tiga kali dilaksanakan, dan UNBK akan terus dilakukan karena sangat efisien. "UNBK di hari pertama ini lancar, tidak ada kendala apapun, baik listrik maupun jaringan sudah bagus," katanya.

Salah seorang siswa, Hendra mengaku tidak merasa kesulitan dengan ujian berbasis komputer karena tidak perlu membawa alat tulis saat ujian. "Meskipun soal ujiannya agak banyak, tapi tidak ada kesulitan mengerjakan," ujarnya.

Ia yakin di pertama ini mata pelajaran Bahasa Indonesia akan lulus. Peralnya, soal ujian tidak terlalu sulit, sebab soal sudah dipelajari sebelumnya dalam Pra-UN yang digelar sebelum UNBK. "Insya Allah lulus dalam ujian tahun ini, karena tahun sebelumnya semua siswa juga lulus," kata Hendra.

Polisi Awasi UNBK

Aparat kepolisian juga ikut mengamankan pelaksanaan UNBK di Batam. Salah satunya Polsek Batuaji. Kapolsek Batuaji Kom-pol Syafrudin Dalimunte mengatakan, pengawasan tak dilakukan secara langsung dengan mendatangi kelas, namun dengan cara melakukan monitoring. "Kami turut serta melakukan pengawasan dengan melibatkan Bhabinkamtibmas," ujarnya.

Dia menambahkan, ada empat SMK yang ada di wilayah Polsek Batuaji, yakni SMKN 1, SMK Hang Nadim, SMK Muhammadiyah dan SMK Al-Mukni. "Meski ujian nasional kali ini tak lagi menggunakan kertas dan minim kebocoran soal, namun pengawasan dan pengamanan perlu kami lakukan," ujarnya.

Pihaknya akan terus mengawasi dan mengamankan UNBK hingga empat hari ke depan. Dengan harapan agar seluruh siswa tak terganggu dan nyaman dalam mengerjakan soal yang diujikan.

● romi kurniawan/
fathurohim

Kios Liar Makin Menjamur di Batuaji

BATUAJI – Kios liar semakin menjamur di sepanjang ROW jalan di kawasan Batuaji. Salah satunya di kawasan Pasar Seken Aviari. Saat ini terdapat puluhan kios semi permanen yang sudah hampir rampung dibangun. Pembangunan kios liar di ROW jalan yang menghadap ke Perumahan Pemda II itu dibangun karena belum ada tindakan tegas apapun dari pemerintah terkait.

Pantauan *KORAN SINDO BATAM*, terdapat sekitar 10 kios yang hampir selesai dibangun. Sementara belasan kios lainnya masih dalam tahap pembangunan. Pembangunan kios semi permanen juga terjadi di lokasi bekas kebakaran pada tahun 2017 lalu. Padahal sebelumnya Camat Batuaji sudah mengingatkan agar lokasi kios yang sudah terbakar itu tak dibangun lagi sebab memakan ROW jalan dan lahan akan dijadikan penghijauan.

Namun imbauan itu tak diindahkan oleh para pedagang, mereka tetap membangun kios semi permanen di lokasi yang sama. Camat Batuaji, Ridwan Afandi mengatakan, surat peringatan sudah dilayangkan, bahkan sudah diserahkan ke Satpol PP Batam. "Untuk pembongkaran kios sudah kami serahkan ke Satpol PP. Kami juga sudah menyurati pengelolanya agar segera dihentikan pembangunan tersebut," ujarnya,

”

“Untuk pembongkaran kios sudah kami serahkan ke Satpol PP. Kami juga sudah menyurati pengelolanya agar segera dihentikan pembangunan tersebut.”

RIDWAN AFANDI
Camat Batuaji

Senin (2/4).

Para pedagang mengaku kembali membangun karena memang belum ada tindakan tegas dari instansi pemerintah terkait. "Kalau mau digusur, deretan Perumahan Pemda II itu terkena dampak penggusuran. Di sana ada puluhan kios yang baru dibangun. Kalau mereka dibiarkan kami juga berhak membangun di sini," kata Manda, seorang pedagang bekas kebakaran di Pasar Seken Aviari.

Selama ini, sambungnya, memang ada teguran dari pihak kecamatan untuk tidak lagi membangun kios liar di lokasi bekas kebakaran. Namun karena belum ada tindakan tegas dari pemerintah akhirnya mereka kembali memanfaatkan ROW jalan itu. "Masih lama lah itu mau ditertibkan. Sekarang kami pakai dulu," ujarnya.

● **fathurohim**

Presiden Jokowi Resmikan MPP Bulan Ini

BATAM KOTA – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Batam akan diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada bulan ini. Awalnya, MPP direncanakan diresmikan akhir Desember 2017, namun akhirnya ditunda karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menghadiri pertemuan OKI yang digelar mendadak. "Kami baru dapat informasi. Tapi surat resmi belum kami terima. Jadi saya belum bisa komentar. Intinya saya minta ke pegawai

untuk persiapan," kata Wali Kota Batam Muhammad Rudi usai apel pegawai Pemko Batam di Dataran Engku Putri Batam Centre, Senin (2/4).

Persiapan yang diminta sesuai arahan Presiden agar seluruh pelayanan pemerintah sudah menggunakan sistem elektronik. Dan sebagai rumah dari pelayanan pemerintah, MPP diminta untuk terlebih dulu melaksanakan hal tersebut. "Nanti semuanya harus pakai online. Dan terinte-

grasi antar layanan," ujarnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Batam, Gustian Riau mengatakan informasi tentang peresmian MPP ini sudah ia terima. Dalam arahan Presiden di pertemuan dengan walikota/bupati, disebutkan mengenai rencana kegiatan April ini.

"Memang disebutkan April, masuk agenda Presiden. Tapi kami belum tahu tanggalnya. Persia-

pannya sudah lama, tinggal kita tingkatkan kinerja," kata Gustian.

Dalam waktu dekat, ia akan mengadakan pertemuan dengan instansi vertikal yang memiliki layanan di MPP. Karena rencananya akan dibuat sistem terintegrasi antar instansi, tidak hanya internal Pemko Batam. Jadi masyarakat cukup satu kali memasukkan berkas jika dokumen yang sama dibutuhkan untuk beberapa perizinan.

"Terintegrasi sudah mulai ja-

lan. Tinggal minta data konektivitas antar instansi. Baik vertikal maupun Pemko sendiri. Mana yang perlu dikoneksikan jadi satu kesatuan," katanya. Meski belum diresmikan, namun MPP yang melayani hingga lebih dari 400 perizinan itu sudah beroperasi sejak akhir tahun lalu. Setidaknya terdapat 14 instansi pemerintah, 9 nonpemerintah dan 6 perbankan yang ikut melayani dalam MPP Batam.

● **iwan sahaputra**

FTZ Tak Bisa Dijalankan Penuh

Masuk Lartas, Produk Farmasi dan Kosmetik Impor Kena Pabean

BATAM KOTA – Tidak adanya kepastian hukum dalam aturan Free Trade Zone (FTZ) Batam, dinilai menjadi celah membuat kebijakan perdagangan bebas masih setengah-setengah, sekalipun insentif ini sudah berjalan hampir 10 tahun.

Praktisi Hukum Ampuan Situmeang mengatakan, fakta di lapangan penerapan FTZ tidak dapat sepenuhnya diberlakukan di Batam sampai saat ini. "Karena masih ada ketida-

kepastian hukum dalam pelaksanaan FTZ. Aturan pabean masih diberlakukan termasuk farmasi dan kosmetika," ujarnya kepada *KORAN SINDO BATAM*, kemarin.

Ampuan menjawab reaksi pengusaha elektronik yang kembali mengeluhkan aturan SNI setiap ingin memasukkan barang ke Batam. Baru-baru ini juga pedagang barang farmasi dan kosmetika kalang kabut ditanyai polisi.

Mereka tidak tahu jika barang farmasi dan kosmetika impor tersebut masuk dalam kategori barang yang dilarang atau terbatas (Lartas) sehingga diberlakukan aturan pabean.

Dia menjelaskan seharusnya

”

Makanya sistem FTZ itu tidak pernah dilaksanakan di Batam secara menyeluruh dan konsekuen,

Ampuan Situmeang
Praktisi Hukum

barang yang masuk ke Batam sebagai FTZ belum kategorikan sebagai impor, sehingga ketentuan kepabeanan dan lainnya

tidak berlaku di Batam. Namun kenyataan yang ada dalam pelaksanaan yang ada di Batam selama ini tidak demikian. Itu sebabnya dia menilai bahwa FTZ tidak dilaksanakan menyeluruh di Batam.

Karena seharusnya ada pengecualian terhadap barang-barang larangan terbatas (lartas) di kawasan FTZ. Terlebih lagi barang untuk keperluan di kawasan industri. Namun yang terjadi saat ini tidak ada pengecualian sama sekali.

Ke hal 12))

FTZ Tak ...

((Dari hal 9

"Makanya sistem FTZ itu tidak pernah dilaksanakan di Batam secara menyeluruh dan konsekuen," ujarnya.

Direktur Lalu Lintas (Dirlalin) Barang BP Batam, Tri Novianta mengatakan ada beberapa hal yang harus dipahami oleh masyarakat. Kendati sebagai kawasan FTZ, tidak serta merta barang yang masuk ke Batam bebas. Melainkan ada beberapa aturan di pabean yang berlaku, tujuannya tidak lain adalah untuk melindungi masyarakat Batam.

Seperti halnya farmasi dan kosmetika, barang-barang ini masuk dalam kategori lartas. Sehingga tetap perlu pengawasan dari pemerintah agar barang tersebut tidak beredar bebas, itu sebabnya ada beberapa aturan pabean yang juga diberlakukan di dalam kawasan FTZ. "Kenapa aturan lartas tetap

diterapkan di FTZ karena di dalamnya ada penduduk. Kecuali kalau KEK (Kawasan Ekonomi Khusus)," ujarnya.

Begitu juga dengan produk yang harus berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI), menurut dia, ada dua jenis barang yang harus menjadi perhatian bersama. Yakni barang yang memang harus wajib SNI dan juga ada barang yang tidak wajib SNI. Sehingga kalau dalam ketentuan yang ada barang tersebut diwajibkan, maka harus ada SNI, namun jika tidak maka diizinkan dijual tanpa SNI.

Sehingga tidak semua barang yang tak berlabel SNI adalah barang ilegal atau tidak boleh di jual. Melainkan sudah ada ketentuan di Kementerian Perdagangan (Kemendag). Aturan ini dibuat untuk melindungi produk dalam negeri, dan

berlaku di seluruh Indonesia.

"Jadi FTZ bebas itu dalam artian fiskal, yakni bebas pajak, bea masuk, dan pembebasan lainnya," kata Tri.

Sebelumnya, pedagang elektronik mengeluhkan adanya kerugian produk elektronik. Hal ini dikarenakan produk elektronik tanpa lisensi SNI yang mereka pasarkan, padahal produk-produk ini banyak digemari oleh masyarakat Batam

Untuk itu Pemprov Kepri mulai mencari solusi untuk meregulasi produk berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diwajibkan oleh pemerintah pusat. Hal ini mengingat Batam, Bintan, dan Karimun masuk ke dalam zona perdagangan bebas di mana masyarakat banyak menemukan produk tidak berlabel SNI, terutama untuk produk elektronik. "Ini merupakan upaya

bagaimana caranya menata tata niaga di Kepri agar tetap kondusif, terutama di dunia perdagangan," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Pemprov Kepri, Burhanuddin, beberapa waktu lalu.

Dia menambahkan, saat ini ada 700 importir yang terdaftar di BP Batam. Burhanuddin meminta agar BP Batam segera melakukan verifikasi bagi perusahaan-perusahaan yang penuh standar SNI dalam memasukkan barang impor ke dalam Kepri.

Untuk satu produk elektronik memiliki banyak turunan yang banyak beredar di pasaran. Dan rata-rata banyak yang tak punya SNI. "Seharusnya importir sudah lengkapi standarnya, sehingga bisa penuh syarat untuk masuk ke Batam," katanya.

Ketua Kadin Batam Jadi

Rajagukguk mengaku sudah banyak keluhan yang diterima dari pedagang yang memasarkan produk-produk elektronik berlabel SNI. Mereka meminta agar Kadin Batam segera mencari solusinya agar persoalan ini tidak berlarut-larut. "Jadi ini terkait dengan SNI barang elektronik yang banyak dikeluhkan pedagang," kata Jadi.

Ia memahami memang tidak mudah untuk mengawasi jalur transit pemasukan barang yang tidak berlabel SNI ke Batam. Makanya cara lain ditempuh dengan merencanakan pembuatan regulasi baru untuk melindungi pedagang yang mematuhi regulasi terkait SNI. "Regulasi baru perlu segera diputuskan. Tujuannya untuk menjaga kondusifitas tata niaga di Batam tetap terjaga," ujarnya.

● **ahmad rohmadi/
agung dedi lazuardi**